

RUJUKAN STUDI BANDING DARI BERBAGAI DAERAH

Komisi A Komitmen Buka Ruang Diskusi

YOGYA (KR) - Komisi A DPRD Kota Yogya menyatakan diri siap untuk membuka ruang diskusi dari berbagai pihak. Hal ini seiring keberadaan Kota Yogya yang sering menjadi rujukan dari berbagai daerah untuk kepentingan studi banding.



KR-Ardhi Wahdan

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogya (kiri) menerima kunjungan Komisi A DPRD Kota Bandung.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogya Marwoto Hadi, mengungkapkan jajaran internal komisinya sudah berkomitmen untuk meladeni secara langsung berbagai pihak yang secara khusus ingin menyinggung gagasan maupun kebijakan berkaitan ketugasannya.

"Komitmen ini kami bangun dalam rangka mewujudkan keterbukaan arus informasi. Makanya ketika ada kunjungan ke sini, kami juga siap membuka diskusi. Silakan datang ke Yogya, kita sharing bersama," tandasnya usai menerima jajaran Komisi A DPRD Kota Bandung di gedung dewan, Senin (27/5).

Menurutnya, hampir setiap hari selalu ada tamu dari luar daerah dengan tujuan studi tiru. Hal itu tidak lepas dari Kota Yogya sebagai ibukota provinsi sekaligus telah menelurkan beragam inovasi. Seperti halnya Komisi A DPRD

Kota Bandung yang ingin sharing berkaitan tugas Komisi A DPRD Kota Yogya bersama mitra kerja eksekutif.

Terutama mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkaitan dana bantuan politik hingga kepastian pelantikan anggota dewan periode 2024-2029. Apalagi sempat muncul informasi atau desas-desus ketidakpastian waktu pelantikan serta teknis pencairan dana bantuan politik. Simpang siur informasi itu pun memunculkan berbagai persepsi.

Terkait hal tersebut, Marwoto menilai jajaran di Kota Yogya selalu menyelaraskan pada aspek aturan. Hingga saat ini agenda pelantikan anggota dewan terpilih tetap berpedoman pada waktu berakhirnya masa jabatan dewan periode 2029-2024 yakni 12 Agustus 2024 mendatang. "Kami tidak ada

perubahan jadwal pelantikan. Saat periode saat ini habis maka saat itu juga dilakukan pelantikan sehingga tidak ada kekosongan jabatan. Sesuai aturan kan masa jabatan anggota dewan lima tahun," jelasnya.

Begitu pula menyangkut dana bantuan politik bagi parpol peraih kursi di dewan yang pencairannya disesuaikan kewenangan masing-masing daerah. Hanya, di Kota Yogya terjadi perubahan nominal dari sebelumnya sekitar Rp 3.000 persuara naik menjadi Rp 8.000 persuara.

Pihaknya sempat mengusulkan disamakan dengan DIY yakni Rp 15.000 persuara namun melalui proses dialog akhirnya tersepakati Rp 8.000 persuara.

"Usulan kami itu sebetulnya realistis karena yang memiliki suara adalah kota. Kemudian yang betul-betul mencari suara hingga mengawasi itu aktivitasnya ada di kota dan kabupaten dengan melibatkan kemantren dan kelurahan. Sehingga pembiayaan lebih banyak memang di kota dan kabupaten," urainya.

Selain itu, dirinya juga memastikan komposisi alat kelengkapan dewan dilandasi dengan semangat kebersamaan. Pemenuhan anggota disesuaikan dengan tata tertib yang tentunya dimiliki oleh setiap lembaga dewan. Sedangkan pimpinan alat kelengkapan ditentukan oleh masing-masing anggotanya. "Semangat kebersamaan ini yang kami bangun di DPRD Kota Yogya," tandasnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Rizal Khairi, menilai Kota Yogya selalu menjadi tujuan wajib dalam untuk studi tiru. Oleh karena itu ketika muncul berbagai informasi yang berbeda pihaknya berupaya mencari perbandingan di daerah lain.

(Dhi)-d

BEM Nusantara DIY dan BEM KBM UJB Gelar Seminar Bisnis

YOGYA (KR) - BEM Nusantara DIY dan BEM KBM Universitas Janabadra (UJB) menggelar seminar bisnis bertema 'Strategi Manajemen Usaha bagi Mahasiswa dalam Bidang UMKM sebagai Entrepreneur Muda' di Auditorium KPH Poerwokoesoemo UJB Yogyakarta, Minggu (26/5). Seminar menghadirkan dua pembicara yaitu Maharani Divaningsy SE BSC (Womenpreneur Saliman Riyanto Group) dan Luluk Ulwiyah (CEO CV Peko Peko Indonesia).

Seminar dibuka oleh Rektor Universitas Janabadra, Dr Risdianto yang menyambut baik diselenggarakannya seminar ini. Rektor juga mendorong para mahasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur muda.

"Tidak ada salahnya, selain berkuliah, mahasiswa juga berwirausaha. Terus asah jiwa entrepreneur sejak dini, tingkatkan kemampuan dan kompetensi bisnis untuk memenangi persaingan dan sebagai bekal menatap masa depan yang lebih cerah," kata Rektor.

Maharani Divaningsy menuturkan, ada tiga hal utama yang harus dipahami seorang pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Pelaku usaha harus paham tentang manajemen finansial atau keuangan. "Karena apabila tidak

dapat mengelola keuangan yang baik bisnisnya tidak akan berkembang," katanya.

Selain itu, lanjut Maharani, harus paham soal marketing atau pemasaran, baik dari segi cara berjualannya dan target pasarnya. Kemudian, pelaku bisnis juga harus punya networking atau jejaring, karena relasi akan mempengaruhi perkembangan bisnis. "Tak kalah penting seorang pebisnis harus konsisten, disiplin, inovasi, menjemen problem market dan yang terakhir harus berdoa dan sedekah," katanya.

Sementara itu, Luluk Ulwiyah menyampaikan bahwa untuk memulai bisnis harus melihat potensi diri sendiri. Tak kalah penting melihat kekuatan keuangan/finansial. "Jangan memaksakan diri, mulailah dari bisnis kecil dan lakukan secara konsisten jangan dulu memikirkan penghasilan yang besar," katanya.

Terkait strategi mengenalkan produk, Luluk menjelaskan ada tiga strategi yakni mengenalkan ke target, eksekusi dan mengelola pelanggan (customer). "Penting untuk merawat pelanggan yang sudah ada dan fokus pada mereka, supaya loyal pada produk kita dan tidak pindah ke produk lain," tuturnya. (Dev)-d



KR-Istimewa

Pembicara menyampaikan paparan seminar.

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

SIDANG PARIPURNA PENGENALAN PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

Bangun Kolaborasi, Pimpinan DPRD Ingatkan Persoalan Utama Kota



KR-Ardhi Wahdan

Jajaran Pimpinan DPRD Kota Yogya salam komando dengan Pj Walikota Yogya diapit oleh unsur Forkompinda Kota Yogya di sela sidang paripurna.

YOGYA (KR) - Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta Ir Sugeng Purwanto MMA yang resmi dilantik pada 22 Mei 2024 mendapat kesempatan memperkenalkan diri di hadapan Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Melalui sidang paripurna yang digelar Senin (27/5) sore, jajaran Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta menunjukkan komitmennya dalam membangun kolaborasi bersama eksekutif. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Momentum pengenalan Pj Walikota Yogyakarta itu juga menjadi media untuk saling mengingatkan. Terutama perihal persoalan utama di Kota Yogyakarta yang membutuhkan solusi segera. Salah satu persoalan yang sudah sangat mendesak ialah penuntasan sampah agar Kota Yogyakarta benar-benar mampu mandiri mengelola sampah. "Kita menaruh harapan besar bagi Pj Walikota Yogyakarta yang baru ini dalam penanganan sampah. Ini bukan lagi menjadi permasalahan yang harus ditangani si A atau si B tetapi tanggungjawab bersama. Sehingga tidak hanya unsur Pemkot saja tetapi kami di lembaga dewan juga punya tanggung jawab," urai Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Dhan Novitasari.

Menurut Dhan, Pj Walikota memiliki kewe-

nangan dan bisa mengambil kebijakan. Akan tetapi kebijakan yang diambil jangan hanya untuk pencitraan melainkan harus mengedepankan aksi nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi jabatan Pj Walikota merupakan penunjukan oleh Gubernur DIY dari kalangan ASN. Tentunya kebijakan yang sifatnya pencitraan sangat tidak elok.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RD-PU) yang melibatkan kalangan masyarakat juga mencuat solusi penanganan sampah. Dalam rapat yang difasilitasi oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogyakarta itu bahkan muncul solusi agar ada pengadaan sarana pendukung berupa alat insenerator untuk pembakaran sampah yang ramah lingkungan. Dari aspek politik anggaran, Pemkot Yogyakarta dinilai tidak akan terbebani. Hal ini karena dari laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah tahun 2023 lalu, terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang cukup besar. Besaran silpa tahun lalu mencapai Rp 278 miliar dan harus dimanfaatkan tahun ini melalui perubahan anggaran.

"Eksekutif menyampaikan ke kami supaya pembahasan APBD perubahan tahun ini diselesaikan oleh anggota dewan periode 2019-2024. Sehingga awal Agustus sebelum pelantikan anggota dewan yang baru sudah bisa di-



KR-Ardhi Wahdan

Sekretaris DPRD Kota Yogya Basuki Hari Saksono (kiri) memberi salam Pj Walikota Yogya Sugeng Purwanto (kanan).

lakukan sidang paripurna. Kami pun siap mendukung untuk segera melakukan pembahasan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjalin harmoni bersama eksekutif," imbuh Dhan.

Oleh karena itu, kebijakan dari Pj Walikota Yogyakarta yang baru sangat dinantikan melalui perubahan anggaran. Termasuk kebutuhan pembelian alat insenerator dengan anggaran perubahan. Menurutnya, alat tersebut sudah menjadi kunci mengolah sampah yang tidak menghasilkan residu lagi. Berbeda dengan model pencacahan maupun produksi RDF yang masih meninggalkan residu. "Dengan insenerator sampah yang dibakar benar-benar habis, sehingga ini bukan negosiasi lagi tetapi sudah harus dimiliki. Kewajiban beli alat pencacah saja bisa masak insinerator tidak bisa. Terkait nanti lokasinya di mana, bisa dipetakan. Kan memungkinkan juga setiap kelurahan dibekali peralatan itu sehingga sampah di wilayah bisa semakin sedikit serta mengurangi beban pengolahan di tingkat kota," paparnya.

Selain itu, inovasi yang ditelurkan oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah juga perlu didukung. Baik berupa dukungan modal maupun penelitian lanjutan agar sesuai dengan kaidah lingkungan berkelanjutan. "Sekarang sudah bukan lagi banyak agenda

sarasehan atau kumpul-kumpul. Masyarakat sudah teredukasi, hanya dukungan sarana dan prasarana dalam mengolah sampah ini yang dibutuhkan. Suport sistem ini yang harus segera dijembatani oleh pemerintah," terangnya.

Selain soal sampah, tugas yang tidak kalah berat bagi Pj Walikota Yogyakarta ialah mengantarkan kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024. Meski masa jabatan Pj kali ini tidak akan genap satu tahun namun Gubernur menunjuk Sugeng Purwanto pasti bukan tanpa alasan. Ada banyak pertimbangan yang menyangkut kinerja dan prestasi dari mantan Kepala Dinas Pertanian DIY itu. "Ketugasan Pj saat ini memang tidak mudah karena masuk ke ranah politik dalam ajang Pilkada Kota Yogyakarta 2024," harapnya.

Menanggapi harapan dari pimpinan dewan, Sugeng Purwanto mengapresiasi dan siap berkolaborasi. Baginya elaborasi dan kolaborasi antara lembaga dewan serta eksekutif wajib terbangun. Hal ini karena jalannya pemerintahan akan semakin optimal manakala lembaga dewan dan pemerintah mampu bersinergi serta saling mendukung satu sama lain. (Dhi)-d